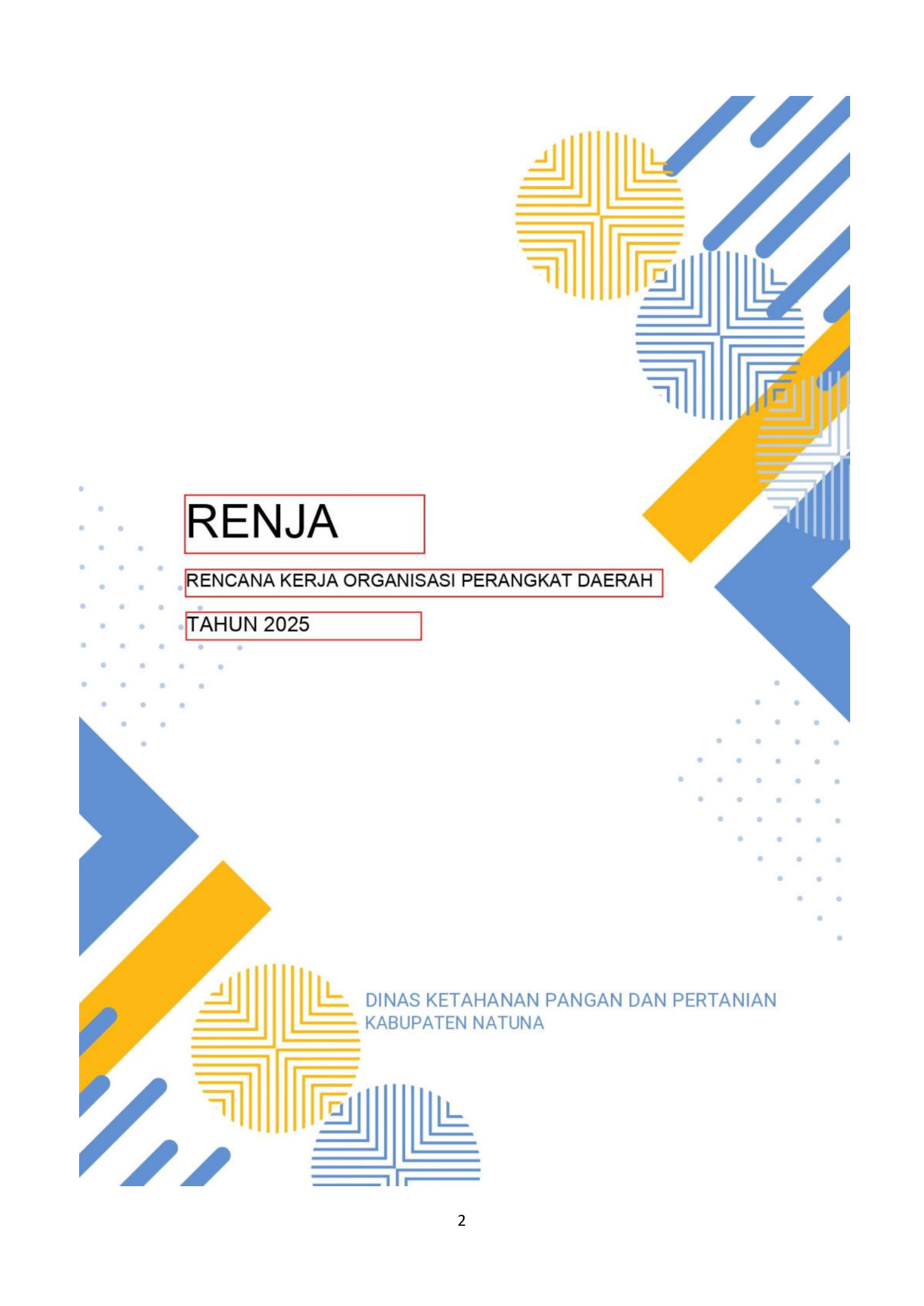




RENJA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN NATUNA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat terwujud. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2024. Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.3 Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian	7
2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	12
2.3 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	44
3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2021-2026.....	44
3.2. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	45
3.3. TUJUAN DAN SASARAN.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	47
BAB V PENUTUP	50

BAB I PENDAHULUAN

1.3 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini akan digunakan sebagai bahan masukan dan arahan (*guidelines*) dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Urusan Pertanian yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang diampu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna.

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna tahun 2021 - 2026 dan Rancangan Akhir RPD 2021-2026.

Nomenklatur kegiatan dalam rencana kerja (renja), selain mengacu kepada Matrik Rancangan Akhir RPD 2021-2026 juga harus mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019. Sehingga diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas bagi penjaringan usulan kegiatan untuk tahun 2024 pada Urusan Pertanian sebagai bahan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 maupun Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, yang merupakan bahan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran OPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan valuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai pedoman dan arahan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 dalam Urusan Pertanian serta lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Tersedianya pedoman penyusunan strategi pencapaian target kinerja Urusan Pangan dan Pertanian;

2. Tersedianya arahan program dan kegiatan beserta beban target sasaran kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026;
3. Tersedianya pedoman dan bahan sinergitas program dan kegiatan dalam proses pepaduserasian usulan dalam pelaksanaan forum OPD urusan Pangan dan Pertanian, serta urusan lain yang terkait;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika bahasan dari Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna 2025, terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, dan Sistematika Penulisan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Tahun Lalu, berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program Kegiatan;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaranyang direncanakan;

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Anggaran		
				Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Pangan	511.026.500,-	36.948.660,-	7,23
2.		Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan	Produksi Sektor Pertanian	2.025.461.560,-	985.746.338,-	48,67
JUMLAH				2.536.488.060,-	1.022.694.998	40,32

No	Sasaran Kinerja (Utama, Program, Kegiatan)	INDIKATOR	Capaian Kinerja Anggaran			CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	13.752.844,00	10.759.812,00	78,24	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	13.752.844,00	10.759.812,00	78,24	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.752.844,00	10.759.812,00	78,24	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	13.655.262.209,00	12.019.853.597,00	88,02	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.429.487.308,00	10.588.506.307,00	92,64	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.429.487.308,00	10.588.506.307,00	92,64	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	957.818.100,00	506.920.844,00	52,92	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	356.400.000,00	94.900.000,00	26,63	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28.715.240,00	22.500.200,00	78,36	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33.700.000,00	23.764.500,00	70,52	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	58.600.000,00	43.061.400,00	73,48	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	85.004.000,00	69.114.100,00	81,31	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.398.860,00	253.580.644,00	64,13	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	797.647.950,00	676.925.236,00	84,87	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.400.000,00	12.400.000,00	80,52	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	34.630.000,00	27.501.500,00	79,42	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	747.617.950,00	637.023.736,00	85,21	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	55.000.000,00	22.000.000,00	40,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55.000.000,00	22.000.000,00	40,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	415.308.851,00	225.501.210,00	54,30	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	322.208.410,00	151.406.150,00	46,99	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	93.100.441,00	74.095.060,00	79,59	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE INTERVENSI CPM	70.119.750,00	9.614.484,00	13,71	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	70.119.750,00	9.614.484,00	13,71	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	70.119.750,00	9.614.484,00	13,71	
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	184.497.500,00	21.096.176,00	11,43	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	184.497.500,00	21.096.176,00	11,43	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	184.497.500,00	21.096.176,00	11,43	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TERNAK	17.847.500,00	15.804.000,00	88,55	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kenaikan populasi ternak	17.847.500,00	15.804.000,00	88,55	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	17.847.500,00	15.804.000,00	88,55	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	857.966.720,00	157.318.617,00	18,34	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	100.000.000,00	48.702.000,00	48,70	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	100.000.000,00	48.702.000,00	48,70	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	338.023.300,00	84.510.817,00	25,00	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	338.023.300,00	84.510.817,00	25,00	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani	419.943.420,00	24.105.800,00	5,74	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	419.943.420,00	24.105.800,00	5,74	
7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	230.838.600,00	86.322.274,00	37,40	

	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	230.838.600,00	86.322.274,00	37,40	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	230.838.600,00	86.322.274,00	37,40	
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	807.701.590,00	654.764.294,00	81,07	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	807.701.590,00	654.764.294,00	81,07	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	807.701.590,00	654.764.294,00	81,07	
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	111.107.150,00	71.537.153,00	64,39	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Dibina	111.107.150,00	71.537.153,00	64,39	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	111.107.150,00	71.537.153,00	64,39	
10	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	76.409.250,00	3.949.250,00	5,17	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	CV Ratio	76.409.250,00	3.949.250,00	5,17	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	76.409.250,00	3.949.250,00	5,17	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	180.000.000,00	2.288.750,00	1,27	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	180.000.000,00	2.288.750,00	1,27	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	180.000.000,00	2.288.750,00	1,27	
Jumlah			16.205.503.113,00	13.053.308.407,00	80,55	

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun 2025 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana walaupun dipertengahan tahun terdapat program revocussing, namun dapat diselesaikan pada saat APBD Perubahan.

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2024 untuk indikator kinerja pertama yaitu meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri diperoleh realisasi sebesar 159,76 % dengan capaian 469,19 %, yang artinya ketersediaan pangan di kabupaten Natuna tahun 2024 mencukupi terutama karena ketersediaan yang berasal dari Bulog dan Pedagang. Sedangkan ketersediaan cadangan pangan yang merupakan intervensi pemerintah pada tahun 2024 hanya tercapai sebesar 16,35 % yang disebabkan tidak terlaksananya pengadaan CPP daerah akibat terjadinya kekosongan kas daerah sebagai dampak tunda salur anggaran dari pusat. Sedangkan untuk indikator kinerja kedua yaitu meningkatnya ekonomi sektor pertanian/perkebunan diperoleh hasil capaian sebesar 11.160,91 Ton dengan capaian sebesar 7,46 atau tidak tercapai sesuai target yang diharapkan. Rendahnya capaian target tersebut disebabkan produktifitas tanaman khususnya tanaman perkebunan sangat rendah akibat kondisi sebagian besar tanaman dalam kondisi tua yang perlu peremajaan kembali. Selain itu dari sektor peternakan, permintaan ternak sapi dari daerah lain sangat berkurang. Pada komoditi tanaman pangan dan hortikultura, luas tanam yang semakin menurun menjadi faktor terjadinya penurunan jumlah produksi secara signifikan dari tahun ketahun akibat nilai tukar petani relatif rendah.

Adapun anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna sebesar Rp. 16.205.503.113,- dimana alokasi untuk mendukung indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp. 2.536.488.060 dengan realisasi sebesar Rp. 1.022.694.998,- (40,32 %) dan anggaran pendukung sebesar Rp. 13.669.015.053,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.030.613.409,- (88,01 %), Efisiensi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tahun 2024 sebesar 19,45 %, persentase ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah anggaran yang tersedia dengan realisasi anggaran. Sedangkan in-efisiensi anggaran pendukung IKU mencapai 59,69 %, tingginya in-efisiensi penyerapan anggaran pendukung maupun anggaran IKU disebabkan kekosongan kas daerah sehingga akibat terjadinya tunda salur anggaran dari

pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau terjadinya tunda bayar (terhutang).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran Kinerja (Utama, Program, Kegiatan)	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi akhir Target
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	80	71,2
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	76	76
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	84,53
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	75
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	65,5
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	85	74
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	Unit	5	5
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	78,72

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	30
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE INTERVENSI CPM	Persen	5	0
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persen	86,67	0
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	13	10
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Nilai	3,55	3,55
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	Persen	10	10
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	25	25
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TERNAK	Persen	0,75	0,7
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kenaikan populasi ternak	Persen	1,48	1,22
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	30	0
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	42	42
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	Paket	1	1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	Ha	2562,4	2562,4
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	1
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani	KM	4	4
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1
7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,45	0,37

	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	Persen	15	15
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	1
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	Persen	7	7
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	40	40
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	40	40
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persen	2	2
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Dibina	Persen	30,58	30,58
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	1
10	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kcal/kap/hr	2400	2400
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	CV Ratio	CV Ratio	10	<10
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kcal/kap/hr	2100	2132
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Gram / Kapita / Hari	57	57
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	7	0

3.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja pada tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja. Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

2.3 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Urusan Pertanian merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2025. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh *stakeholder* dengan berpedoman kepada matrik RPD 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan Pertanian dan Penataan Ruang ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya

kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Natuna bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Natuna. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada berikut ini :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
01.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					19,050,126,434				57,091,805,634
01.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					19,050,126,434				57,091,805,634
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14,032,019,234				31,719,145,634
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					14,154,119,234				32,524,145,634
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	NILAI		80.50	35,000,000			81	64,388,600
2.09.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		78	35,000,000			80	64,388,600
2.09.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kabupaten Natuna	2	35,000,000			2	64,388,600
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	PERSEN		90	13,142,359,234			90	26,834,757,034
2.09.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu		1	10,947,293,434			1	10,947,293,434
2.09.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kabupaten Natuna	83	10,947,293,434			83	10,947,293,434
2.09.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		95	60,000,000			95	105,000,000
2.09.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kabupaten Natuna	3	35,000,000			3	60,000,000
2.09.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kabupaten Natuna	3	25,000,000			3	45,000,000
2.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen		75	882,649,800			80	3,279,549,000
2.09.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kabupaten Natuna	1	217,149,800			1	1,060,749,000
2.09.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kabupaten Natuna	1	45,000,000			1	50,000,000
2.09.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kabupaten Natuna	1	30,500,000			1	248,800,000
2.09.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kabupaten Natuna	1	50,000,000			1	300,000,000
2.09.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kabupaten Natuna	12	10,000,000			12	20,000,000
2.09.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Kabupaten Natuna	1	80,000,000			1	1,000,000,000
2.09.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kabupaten Natuna	12	450,000,000			12	600,000,000
2.09.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	Unit		5	66,600,000			5	660,000,000
2.09.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kabupaten Natuna	5	66,600,000			5	660,000,000

2.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen		85	791,836,000		90	9,862,914,600
2.09.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kabupaten Natuna	1	25,000,000		1	36,000,000
2.09.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kabupaten Natuna	2	26,000,000		2	52,000,000
2.09.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kabupaten Natuna	1	740,836,000		1	9,774,914,600
2.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	Persen		70	30,500,000		75	100,000,000
2.09.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kabupaten Natuna	5	30,500,000		5	100,000,000
2.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen		80	363,480,000		80	1,880,000,000
2.09.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kabupaten Natuna	7	268,480,000		7	1,800,000,000
2.09.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kabupaten Natuna	1	95,000,000		1	80,000,000
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE INTERVENSI CPM	PERSEN		5	80,918,000		5	250,000,000
2.09.02.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persen		93.33	80,918,000		100	250,000,000
2.09.02.2.01.01.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	Kabupaten Natuna	14	80,918,000		15	250,000,000
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) KETERSEDIAAN	KKAL/KAP/HR		2400	52,418,000		2400	385,000,000
2.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	CV Ratio	CV Rasio		10	52,418,000		10	385,000,000
2.09.03.2.01.01.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	Kabupaten Natuna	1	52,418,000		1	385,000,000
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) KONSUMSI	KKAL/KAP/HR		2100	316,768,000		2100	1,430,000,000
2.09.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Gram/Kapita/Hari		57	316,768,000		57	1,430,000,000
2.09.03.2.04.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Kabupaten Natuna	8	316,768,000		9	1,430,000,000
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PREVALENCE PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT	NILAI		3.03	485,418,000		2.51	3,000,000,000
2.09.04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	Persen		10	485,418,000		10	3,000,000,000
2.09.04.2.02.02.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kabupaten Natuna	30	485,418,000		35	3,000,000,000
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG AMAN	PERSEN		90	41,238,000		95	560,000,000
2.09.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	Sample		60	41,238,000		60	560,000,000
2.09.05.2.01.05.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kabupaten Natuna	1	41,238,000		1	560,000,000
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					5,018,107,200			25,372,660,000
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					4,896,007,200			24,567,660,000
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	PERSEN		1.5	522,967,500		1.5	2,560,000,000
3.27.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lahan Tanaman Pertanian/Perkebunan yang Dimanfaatkan	Persen		1.53	522,967,500		1.53	2,560,000,000

3.27.02.2.02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Kabupaten Natuna	5	522,967,500			5	2,560,000,000
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAikan PRODUKSI TERNAK	PERSEN		0,75	2,086,455,000			0,75	4,800,000,000
3.27.02.2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kenaikan populasi ternak	Persen		1.48	2,086,455,000			1.48	4,800,000,000
3.27.02.2.06.01.	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	Kabupaten Natuna	30	2,086,455,000			30	4,800,000,000
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	UNIT		43	1,230,383,610			44	4,340,000,000
3.27.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	Paket		1	577,266,110			1	300,000,000
3.27.03.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	Kabupaten Natuna	1	577,266,110			1	300,000,000
3.27.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	Ha		2562,4	303,117,500			2562,4	3,840,000,000
3.27.03.2.01.01.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	Kabupaten Natuna	1	303,117,500			1	3,840,000,000
3.27.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan	Unit		1	250,000,000			1	100,000,000
3.27.03.2.02.08.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	Kabupaten Natuna	1	250,000,000			1	100,000,000
3.27.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani	KM		4	100,000,000			4	100,000,000
3.27.03.2.02.03.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	Kabupaten Natuna	1	100,000,000			1	100,000,000
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	PERSEN		0,43	359,097,500			0,4	5,950,000,000
3.27.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	Persen		15	359,097,500			15	5,950,000,000
3.27.04.2.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	Kabupaten Natuna	1	359,097,500			1	5,950,000,000
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIKENDALIKAN/DITANGGULANGI	PERSEN		7,5	432,711,590			8,0	3,520,000,000
3.27.05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha		40	432,711,590			40	3,520,000,000
3.27.05.2.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	Kabupaten Natuna	40	432,711,590			40	3,520,000,000
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DAN KELEMBAGAAN PETANI	PERSEN		2,0	264,392,000			2,0	3,397,660,000
3.27.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Penyuluh Yang Mempunyai Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Persen		20	165,992,000			20	1,925,000,000
3.27.07.2.01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	Kabupaten Natuna	1	165,992,000			1	1,925,000,000
3.27.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase poktan yang mengikuti sekolah lapang	Persen		1.3	98,400,000			1.3	1,472,660,000
3.27.07.2.01.05.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	Kabupaten Natuna	5	98,400,000			5	1,472,660,000
JUMLAH						19,050,126,434				57,091,805,634

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : ***“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Untuk mendukung terwujudnya struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

3.2. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Pembangunan Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapai pada zaman kesultanan Riau Lingga, dimana Kepulauan Riau dikenal menjadi sebagai salah satu pusat pemerintahan, pusat pengetahuan, perdagangan dan pusat peradaban Melayu. Hingga awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, Kepulauan Riau adalah daerah yang makmur. Pada masa itu Kepulauan Riau dikenang dengan "zaman dolar". Oleh sebab itu, maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021– 2026 yaitu: “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya” Visi besar di atas akan diwujudkan dengan mengemban 5 (lima) misi, yakni :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa
3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mengembangkan peluang dan inovasi baru serta mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna sebagai organisasi yang membantu Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai perencana penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, perlu perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Natuna harus mengacu pada visi Bupati Kabupaten Natuna sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sasaran strategis/tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis, dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin di capai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan;
3. Meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang Bersih dan Akuntabel;
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima.

Keterkaitan dokumen antara yang satu dengan lainnya penting untuk mengukur sejauhmana kesesuaian perencanaan dimulai dari penetapan visi pembangunan 5 tahun (RPJMD) hingga penyusunan program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, perlu usaha untuk memperkuat struktur kelembagaan dan mekanisme perencanaan pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal 2020 / 2021	Target				
						2023	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan	LPE sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	-2,38	2,24	3,71	3,81	3,91	4,01

Koordinasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi daerah serta untuk makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu

adanya peran aktif masyarakat sebagai pengawas dan koordinator pembangunan. Berdasarkan **TUJUAN** tersebut maka **SASARAN** yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri;
- Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan;
- Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

Hubungan antara tujuan, dan sasaran; beserta target-targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tujuan, Sasaran, dan indikator Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2021)
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	30,29 %	33,89 %	33,97 %	34,05 %	34,13 %	34,21 %	34,21 %
	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan	Produksi Sektor Pertanian	129.266	135.729	142.516	149.641	157.123	164.980	164.980

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dijabarkan di dalam Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 ini. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sebagai berikut :

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE INTERVENSI CPM
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) KETERSEDIAAN
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	CV Ratio
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) KONSUMSI
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PREVALENCE PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG AMAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lahan Tanaman Pertanian/Perkebunan yang Dimanfaatkan
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TERNAK
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kenaikan populasi ternak
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIKENDALIKAN/DITANGGULANGI
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DAN KELEMBAGAAN PETANI
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Penyuluh Yang Mempunyai Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase poktan yang mengikuti sekolah lapang
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan/Material
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

BAB V PENUTUP

Dengan melihat latar belakang keterbatasan semua sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia, peralatan, pendanaan maupun dengan melihat berbagai tantangan meliputi tantangan kondisi fisik geografis Natuna yang berbukit-bukit dan relatif labil serta rawan bencana, kondisi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, menyebabkan target Standar Pelayanan Minimal belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025, semoga dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ranai, Januari 2024

Kepala,



WAN SYAZALI, SKM

NIP. 19760507 200502 1 007

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

TAHUN : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
2.1.1.1.1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	34,05
2.1.1.1.2.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	149.641
6.1.1.1.1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai LAKIP	Nilai	80
6.1.1.2.1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,48

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

TAHUN : 2025

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
01.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	64.388.600
		Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2
		Outcome	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	80
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.697.293.434
		Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	36.000.000

		Output	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60.000.000
		Output	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	45.000.000
		Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	102.000.000
		Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
		Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	6
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	54.400.000
		Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	40.000.000
		Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85

01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	400.000.000
		Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	145.000.000
		Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	36.000.000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	28.000.000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	888.628.600
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tahun	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tahun	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85

01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60.000.000
		Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tahun	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	8.500.000
		Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	2
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
02.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
02.2.01.03.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Laporan	3
		Outcome	Persentase Intervensi CPM	Persen	5
02.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	80.000.000
		Output	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Paket	1
		Output	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Unit	1
		Outcome	Persentase Intervensi CPM	Persen	5
02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
02.2.02.03.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	200.000.000
		Output	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman	Liter	200
		Output	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman	Paket	1
		Output	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman	Tahun	10
		Output	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman	Unit	2
		Outcome	Persentase kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persen	1
02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				

02.2.02.04.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		0
		Outcome	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	Persen	2
02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
02.2.02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / T anaman	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	1.218.750.000
		Output	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Batang	10.101
		Output	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Paket	11
		Output	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Ton	1
		Outcome	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	Persen	2
02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
02.2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				
02.2.06.03.	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	1.050.000.000
		Output	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	65
		Outcome	Persentase kenaikan produksi ternak	Persen	1
02.2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				
02.2.06.02.	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Paket	1
		Outcome	Persentase kenaikan produksi ternak	Persen	1
02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
02.2.01.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	30.000.000
		Output	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Paket	1
		Outcome	Persentase sarana pertanian yang digunakan	Persen	64
02.2.01.02.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	250.000.000
		Output	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Ton	20
		Output	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Unit	1
		Outcome	Persentase sarana pertanian yang digunakan	Persen	64
03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				

03.2.01.02.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		0
		Outcome	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kap/hr	2.400
03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		0
		Outcome	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kap/hr	2.400
03.2.01.06.	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		0
		Outcome	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kap/hr	2.400
03.2.01.10.	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan		0
		Outcome	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kap/hr	2.400
03.2.01.12.	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	196.000.000
		Output	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	1
		Outcome	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kap/hr	2.400
03.2.03.	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi				
03.2.03.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		0
		Outcome	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kap/hr	2.400
03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
03.2.04.01.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		0
		Outcome	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kkal/kap/hr	2.100
03.2.04.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	122.500.000
		Output	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok	7
		Outcome	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kkal/kap/hr	2.100
03.2.04.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0

		Output	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		0
		Outcome	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kkal/kap/hr	2.100
03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian				
03.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	273.750.000
		Output	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Paket	11
		Outcome	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	41
03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian				
03.2.01.15.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	243.627.278
		Output	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Paket	5
		Output	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Unit	1
		Outcome	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	41
03.2.01.16.	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1
		Outcome	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	41
03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian				
03.2.01.17.	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen	1
		Outcome	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	41
03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian				
03.2.02.08.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1
		Outcome	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	41
03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian				
03.2.02.03.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	1.028.000.000
		Output	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Meter	1.100
		Output	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1

		Outcome	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	41
03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian				
04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				
04.2.01.05.	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	361.000.000
		Output	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Dosis	1
		Output	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Liter	1
		Output	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Paket	6
		Output	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Unit	11
		Outcome	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0
04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
04.2.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				
04.2.01.01.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		0
		Outcome	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Nilai	4
04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				
04.2.02.02.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	244.000.000
		Output	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok	1
		Output	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	1
		Output	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	25
		Outcome	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Nilai	4
04.2.02.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1
		Outcome	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Nilai	4
05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				

05.2.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	154.000.000
		Output	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kotak	400
		Output	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Liter	354
		Output	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Paket	1
		Output	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Unit	10
		Outcome	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	Persen	7
05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				
05.2.01.04.	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
05.2.01.04.	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		0
		Output	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		0
		Outcome	Persentase Pangan Segar yang Aman	Persen	90
		Outcome	Persentase Pangan Segar yang Aman	Persen	90
05.2.01.06.	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		0
		Outcome	Persentase Pangan Segar yang Aman	Persen	90
05.2.01.07.	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	16.000.000
		Output	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1
		Output	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Paket	5
		Outcome	Persentase Pangan Segar yang Aman	Persen	90
05.2.01.09.	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	229.000.000
		Output	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1
		Output	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Paket	3
		Outcome	Persentase Pangan Segar yang Aman	Persen	90
07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				

07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
07.2.01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	151.833.000
		Output	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	10
		Output	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Paket	1
		Outcome	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persen	2
07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
07.2.01.02.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	7.500.000
		Output	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Buah	2
		Output	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kotak	200
		Outcome	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persen	2
07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
07.2.01.05.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	45.253.200
		Output	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kotak	300
		Output	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Paket	10
		Outcome	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persen	2
07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
07.2.01.03.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	95.000.000
		Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Paket	2
		Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	1
		Outcome	Persentase Sarana dan Prasarana BPP Yang Diadakan/Dibangun	Persen	7